

Auditor Minim, Pengawasan Melemah

PONTIANAK—Kepala Inspektorat Kalbar, John Itang mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah provinsi dalam pengelolaan keuangan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Kekurangan SDM tidak hanya terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi juga di Inspektorat Daerah. Hal ini mengakibatkan dalam laporan keuangan selalu terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

“Yang jelas, temuan-

temuan BPK itu pasti akan ada. Itu terkait dengan SDM pengelola, di tingkat pelaksanaan SKPD dan di inspektorat. Di inspektorat juga masih kekurangan, baik kualitas maupun kuantitas,” katanya usai Rapat Koordinasi Inspektorat se-Kalbar di Hotel Mercure, kemarin.

Sampai sekarang, Inspektorat Daerah Kalbar hanya memiliki 46 auditor. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah satuan kerja yang perlu dipantau. Selain

mengawasi SKPD di lingkungan pemprov yang mencapai 46 unit, Inspektorat Daerah Kalbar juga harus memantau seluruh kabupaten/kota.

“Bayangkan, selain provinsi, kita juga harus mengawasi kabupaten/kota. Idealnya paling tidak jumlah auditor kita mendekati seratus,” ujarnya. Untuk mengatasi kekurangan ini, setiap tahun Inspektorat memprogramkan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga

• ke halaman 15 kolom 1

Auditor Minim, Pengawasan jadi Lemah ✓

Sambungan dari halaman 9

auditor. Tahun lalu, sedikitnya 20 auditor sudah dilatih. Selain itu, pemprov juga mengupayakan penambahan tenaga melalui rekrutmen CPNS. Di tahun 2010, Inspektorat sebagian jatah 7 PNS baru lulusan D3 akuntansi.

Menurut John Itang, kekurangan SDM pengelola keuangan di tingkat SKPD juga dinilai sangat berpengaruh terhadap temuan serta opini BPK yang bakal diraih. Kadang-kadang, kata dia, akibat SDM yang belum dilatih, upaya penerapan aturan dalam pengelolaan keuangan dirasakan sulit, terutama dalam hal penyamaan persepsi. Jika SDM belum baik, dia menyarankan adanya diklat.

“Di SKPD itu, apakah SDM pengelola sudah baik. Kalau belum baik, perlu ditingkatkan supaya lebih baik. Kadang kesulitannya tidak tertampungnya anggaran untuk pelatihan seperti ini. Walaupun kita

mau, kalau anggaran tidak tersedia, ya tidak bisa juga,” tambah dia.

Rakor inspektorat se-Kalbar ini menurutnya adalah langkah yang diambil pemprov guna mendorong peningkatan opini BPK atas laporan keuangan pemprov dan pemkab/pemkot se-Kalbar. Tahun 2012, ditargetkan seluruh laporan keuangan pemprov/pemkab/pemkot di provinsi ini dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Melalui rakor ini pula, seluruh pemda di Kalbar berkomitmen meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi pengawasan guna meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dan pembangunan. Dalam rakor tertutup ini, sejumlah narasumber dari BPK RI didatangkan. Para narasumber menyampaikan gambaran tentang strategi pengelolaan keuangan untuk meraih opini WTP.

Guna meraih tujuan WTP,

tambah John Itang, Inspektorat akan melakukan monitoring terhadap laporan keuangan yang dibuat masing-masing SKPD.

“Seperti apa laporan keuangan yang dibuat, bagaimana pertanggung jawaban atas keuangannya, yang sudah di SPJ-kan berapa, yang belum berapa. Itu sebagai alat kendali kita agar di akhir tahun anggaran nanti, per 31 Desember, laporan keuangan bisa tersusun dengan cepat dan benar,” katanya.

Sementara itu, Hernold Ferry M, Kasub Auditoriat I BPK RI di Pontianak menilai bahwa pemprov sudah punya itikad baik dalam meningkatkan tata kelola keuangannya. Untuk membenahi tata kelola keuangan, tambah Hernold, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Tiga hal tersebut yakni SDM, sistem dalam proses penyusunan laporan keuangan dan monitoring atau pengawasan.

Ketersediaan SDM pen-

gelola yang profesional di setiap satuan kerja dinilai perlu diperhatikan. Begitu pula dengan sistem penyusunan laporan keuangan. “Kalau sistemnya bagus, itu akan mengurangi risiko,” ujarnya. Hernold mengibaratkan bahwa upaya untuk mencapai opini WTP adalah seperti membangun rumah megah. Untuk itu perlu pondasi dan pilar yang kuat. Di samping itu, perlu juga adanya investasi berupa anggaran serta SDM.

SDM pengelola keuangan yang profesional di lingkungan Pemprov Kalbar menurutnya perlu ditambah. Untuk itu, dia menyarankan supaya pemprov memanfaatkan adanya program studi/jurusan akuntansi yang ada di Universitas Tanjungpura. Pemprov dapat bekerjasama dengan Untan dalam mendidik putra daerah untuk menjadi tenaga akuntan. Kecukupan tenaga akuntan ini dinilai penting agar sistem pengelolaan keuangan bisa dijalankan dengan baik. (ml)